Edisi II 2017

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

TEMPOYAC JAMBI

www.jambi.bpk.go.id

DARI KOKI

Dalam Tempoyac Jambi Edisi II Tahun 2017 kali ini, tim redaksi menyajikan informasi seputar kegiatan di BPK Perwakilan Provinsi Jambi antara lain: Penyerahan LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Wilayah Provinsi Jambi, Observasi Mahasiswi Universitas Jambi, Upacara Bendera Peringatan Harkitnas ke-109 Tahun 2017, Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017, dll.

Semoga Tempoyac Jambi Edisi II Tahun 2017 kali ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca setianya.

Salam Hangat,
Tim Redaksi

DAFTAR MENU

Menu	Hal
Penyerahan LHP LKPD Unaudited	1-5
Observasi Mahasiswi Universitas Jambi	5
Upacara Bendera Peringatan Harkitnas ke-109 Tahun 2017	6
Penyerahan LHP LKPD TA 2016	7-8
Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017	9
Galeri Foto	12-14
Galeri Photo	10-18

Berita Utama

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Unaudited*) ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang tersebut, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi dilaksanakan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun Anggaran 2016 kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Adapun pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD TA 2016 (*unaudited*) ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi, antara lain:

Pada hari Kamis, 30 Maret 2017:

⇒ Pemerintah Kabupaten Batanghari oleh Bupati Batanghari, **Syahirsah**.

⇒ Pemerintah Kabupaten Tebo oleh Pj. Bupati Tebo, **Agus Sunaryo**.

⇒ Pemerintah Kabupaten Kerinci oleh Bupati Kerinci, **Adi Rozal**.

⇒ Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi oleh Pj. Bupati, **Kailani**.

⇒ Pemerintah Kabupaten Bungo oleh Bupati Bungo, **Mashuri**.

Pada hari Jumat, 31 Maret 2017:

⇒ Pemerintah Kota Sungai Penuh oleh Wali Kota Sungai Penuh, **Asafri Jaya Bakri**.

⇒ Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserahkan oleh Bupati **Romi Haryanto.**

⇒ Pemerintah Kabupaten Merangin diserahkan oleh Bupati Merangin, **Al Haris**.

Pada hari Senin, 3 April 2017:

⇒ Pemerintah Provinsi Jambi diserahkan oleh Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli.

⇒ Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, **Amir Sakib**.

Pada hari Selasa, 11 April 2017

⇒ Pemerintah Kabupaten Sarolangun oleh Pj. Bupati Sarolangun menyampaikan LKPD *Unaudited*, **Arief Munandar** LKPD tersebut diterima oleh Kepala Subauditorat Jambi II, **Ronald Sinaga**

Dengan telah diterimanya LKPD TA 2016 *unaudited* dari 12 pemerintah provinsi/kota/kabupaten di wilayah Provinsi Jambi, maka Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi akan segera menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas LKPD TA 2016 *unaudited.*

BPK Perwakilan Provinsi Jambi Menerima Kunjungan Observasi

Pada Rabu, 5 April 2017 bertempat di Ruang Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Kasubbag Humas dan TU Kalan), BPK Perwakilan Provinsi Jambi menerima kunjungan observasi dari Mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi sebanyak 5 orang mahasiswa. Pelaksanaan observasi ini diterima oleh Kasubbag Humas dan TU Kalan BPK Provinsi Jambi, Tongku Badulla Harahap. Dalam sambutannya, Tongku Badulla Harahap menyampaikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyambut baik kegiatan observasi rekan-rekan mahasiswa yang bertujuan mengumpulkan data Manajemen Humas lembaga negara dhi. Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah.

Pelaksanaan observasi dilaksanakan selama tiga hari yaitu mulai tanggal 5 s.d. 7 April 2017. Dalam kunjungan ini disampaikan berbagai hal terkait tugas, fungsi, kewenangan, visi dan misi BPK sebagai lembaga negara yang diberikan mandat dalam UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Selain itu dijelaskan kepada mahasiswa terkait struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi, struktur organisasi Humas dan TU Kalan, prosedur operasional standar, peran dan fungsi Subbag Humas dan TU Kalan dalam Perwakilan BPK.

Perwakilan mahasiswa menyampaikan terima kasih kepada BPK karena telah diterima dengan hangat dalam pelaksanaan observasi ini. Mahasiswa berharap pelaksanaan observasi terkait kehumasan ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi Kehumasan di Kantor Perwakilan BPK, sehingga dapat dibandingkan dengan teori-teori Manajemen Kehumasan yang selama ini dipelajari di perkuliahan. Kegiatan yang diawali dengan sesi perkenalan dan ramah tamah ini berlangsung dengan baik dan diakhiri dengan foto bersama.

UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-109 TAHUN 2017

"Semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari-hari ini. Padahal semangat itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa. Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abai terhadap aspek ini.

Malah sejak awal, dalam program Nawacita yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antarwilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Memang persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa. Bahkan negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama. Beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang, dibanding Indonesia.

Namun bagi kita mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Berlatarbelakang pemikiran tersebut, maka kiranya tema "Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional" yang menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogyanya tidak hanya tertanam di dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa"

Demikian penggalan pidato tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi pada Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun 2017 pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2017 di Halaman Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Bapak Parna dan sebagai Komandan Upacara Auditor pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Agung Pramudito. Upacara yang dimulai pada pukul 07.30 WIB ini diikuti dengan khidmat oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TA 2016

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Penyerahan LHP dilakukan di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Jambi.

Mewakili Anggota V BPK RI, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Bapak Parna menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jambi TA 2016 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi tanggal 3 Juni 2017 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi.

Dalam sambutan Anggota V BPK RI yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, antara lain disampaikan bahwa Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Tahun 2016 ini merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya; hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya.

Dengan LKPD berbasis akrual, Pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibanding dengan sebelum penerapan akrual yang hanya 4 (empat) laporan.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut peraturan perundangan, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah: (a) Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) Kecukupan informasi laporan keuangan; (c) efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan (d) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan".

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai "kewajaran" laporan keuangan bukan merupakan "jaminan" tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. Hal ini disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jambi, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan yang bersangkutan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Pimpinan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAMBI TA 2016

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi. Penyerahan LHP dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam empat tahap yaitu pada tanggal 29 mei 2017, tanggal 30 Mei 2017, tanggal 2 Juni 2017 dan tanggal 7 Juni 2017.

Penyerahan LHP LKPD TA 2016 dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Bapak Parna kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi menyatakan "pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan informasi laporan keuangan;
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan
4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan dan sesuai basis akrual Laporan Keuangan Pemerintah Daerah jumlah laporan yang harus disajikan sebanyak tujuh laporan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan belum secara khusus dimaksudkan untuk mengungkap adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP dan dalam batas tertentu akan mempengaruhi opini terhadap kewajaran LK secara keseluruhan. Opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terdiri dari 4 (empat) jenis Opini yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
3. Opini Tidak Wajar (TW); dan
4. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Penyerahan LHP LKPD di wilayah Provinsi Jambi yaitu:

1. Tanggal 29 Mei 2017, penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Batang Hari, Muaro jambi, Tebo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** sedangkan LHP atas LKPD Kabupaten Bungo dengan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**;
2. Tanggal 30 Mei 2017, penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Merangin dan Kota Jambi dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),** sedangkan LHP atas LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP);**
3. Tanggal 2 Juni 2017, penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan opini **Tidak Memberikan Pendapat (TMP);**
4. Tanggal 7 Juni 2017, penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Sarolangun dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Hasil Pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada para Bupati dan Wali Kota untuk ditindaklanjuti serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2017

"Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Ir. Sukarno. Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 adalah jiwa besar para *founding fathers*, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita. Oleh karena itu, saya mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan.

Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang Anti Pancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRI, Anti-Bhinneka Tunggal ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia. Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan Indonesia". Demikian penggalan pidato tertulis Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi pada Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 pada Hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 di Halaman Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

SELAMAT ULANG TAHUN

HERMAWAN
7 April

SYAFRIZAL AKMAL
16 Aprill

DEDI EFENDI
20 Aprill

SANDRA F.
20 Aprill

INDRI APRIANI
24 Aprill

ADAM NUGRAHA
1 Mei

MARIETHA
2 Mei

AZHAR
3 Mei

SUBAGIJANTO
9 Mei

DHIAN ADHI N.
17 Mei

M. RISKI MARBUN
31 Mei

ANDREAS S.
5 Juni

ARY HARJANTI
10 Juni

YUNITA KURNIA P.
11 Juni

AFRIZA TRI E.
13 Juni

M. RUSTAM AJI
14 Juni

RIDWAN SAIDI
14 Juni

LENY ANGGRAINI
20 Juni

SULLIVAN
24 Juni

GABRIEL S.
26 Juni

Semoga selalu dalam lindungan-Nya, sukses dan tetap berjaya

Selamat Menempuh Hidup Baru

Putri & Aji

Semoga Menjadi Keluarga Yang Sakinah, Mawadah dan Warrahmah

Galeri Foto

Pengarahan Kepala Perwakilan dalam rangka RAT Koperasi Mayang Mangurai BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun Buku 2016

Pembagian Hadiah dalam rangka RAT Koperasi Mayang Mangurai BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun Buku 2016

Undangan Pelantikan Bupati Muaro Jambi, Sarolangun dan Tebo

Undangan Pelantikan Bupati Muaro Jambi, Sarolangun dan Tebo

Supervisi Pemeriksaan LHP LKPD TA 2016 di Kabupaten Kerinci

Supervisi Pemeriksaan LKPD LKPD TA 2016 di Kabupaten Kerinci

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Batang Hari dan Kerinci TA 2016

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Tebo dan
Kota Sungai Penuh TA 2016

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Bungo TA 2016

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Muaro Jambi TA 2016

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Tanjabtim TA 2016

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Merangin TA 2016

Penyerahan LHP LKPD Kota Jambi TA 2016

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Tanjabbar TA 2016

Konferensi Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2016

Konferensi Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2016

TEMPOYAC

Brigade de cuisine - Tim Redaksi

Dapur Kendali :
Subbagian Humas dan TU
BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Jl. Pangeran Hidayat KM 6,5 No.65
Kel.Sukakarya Kec.Kotabaru
Jambi 36127

Chef de cuisine	*: Tongku Badulla Harahap*
Sous-chef de cuisine	*: Eko Gemini Putra F.*
Cuisinier	*: Putri Rachmasari*
	Yunita Kurnia Putri
	Harry Adriansyah
	Mekrolius
Pattisier	*: Annastasia Ganieta*
	Ristika Pra Dewi
	Sandra Fitria Sari
	M. Syahrain